

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan bukan merupakan isu baru, hingga saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi sebuah bangsa, baik bagi negara *underdeveloped*, negara yang masih berkembang, maupun bagi negara maju. Namun tentunya ada perbedaan kemiskinan yang terjadi, yakni tingkat kemiskinan dinegara maju lebih kecil dibandingkan negara berkembang dan *underdeveloped*. Menurut Nano Prawoto (2008:59) Indonesia sebagai negara berkembang tekanan kemiskinan yang dihadapi yaitu selain tidak mendapatkan fasilitas kehidupan modern, kebutuhan dasar (*basic need*) masih menjadi persoalan serius. Persoalan kemiskinan tentunya akan menimbulkan masalah baru apabila tidak segera diatasi, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan penyakit sosial salah satunya yaitu tingkat kriminalitas yang akan semakin meningkat.

Berkaitan dengan persoalan kemiskinan di Indonesia sebagaimana dikemukakan pada Maret 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS):

“Persentase angka kemiskinan di Indonesia mencapai 2 digit yakni sebesar 10,14 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 27.542.77 ribu jiwa. Sedangkan garis kemiskinan tercatat sebesar Rp.472.525,00/kapita/bulan. Sedangkan Rata-rata rumah tangga miskinnya sendiri yaitu tercatat mempunyai 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, rata rata garis kemiskinan/ rumah tangga yaitu sebesar Rp.2.121.637,00/rumah tangga miskin/bulan. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sendiri sebesar 4.572.73 ribu jiwa. Untuk wilayah Kabupaten Malang sendiri ada sebesar Rp.338.156,00/kapita/bulan garis kemiskinan pada tahun 2020.”

Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjadi sistem ekonomi yang paling mendasar, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) sehari-hari dalam keluarga. Indikator yang paling sering dipakai untuk menentukan kriteria miskin bagi masyarakat salah satunya yakni tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangganya (Masykur, 2015:34). Jumlah pengeluaran konsumsi harus seimbang dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Uraian tersebut senada dengan pendapat Masithoh (2016:531) bahwa rendahnya pengelolaan ekonomi juga akan menimbulkan dampak pada sikap konsumtif masyarakat sehingga mengerucutkan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan data kemiskinan yang dicatat oleh BPS menunjukkan bahwa rata-rata Ekonomi Rumah Tangga (ERT) belum bisa tercukupi. Masyarakat masih kesusahan untuk memenuhi basic need masing-masing. Perencanaan dan pengelolaan ekonomi Rumah Tangga (ERT) penting untuk dilakukan sebagai usaha dalam mempertahankan kelanjutan kehidupan keluarga, yaitu dengan segala daya upaya individu tersebut agar dapat menjamin kehidupannya.

Gambar 1.1

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita dalam Sebulan Berdasarkan Jenis Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Malang

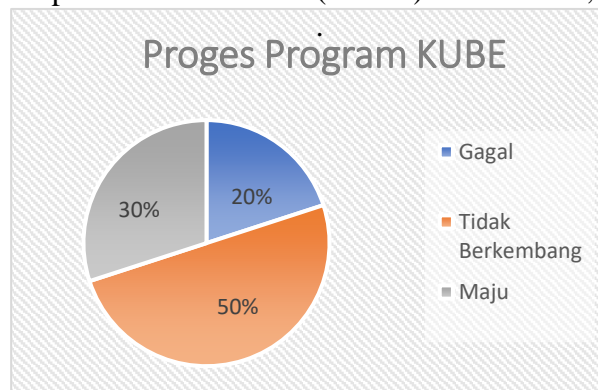
Pengeluaran Perkapita Sebulan	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Makanan dan Non Makanan (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Pengeluaran Makanan	466 529,00	465 681,06	450 082,00
Pengeluaran Non Makanan	479 477,00	522 172,02	507 779,00
Jumlah	946 006,00	987 853,08	957 860,00

Sumber: BPS Kabupaten Malang 2021

Salah satu upaya untuk meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) yaitu dengan dilaksanakannya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana program tersebut dari Kemensos Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Kabupaten Malang salah satu daerah yang juga melaksanakan program KUBE guna peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Program ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berdasarkan Basis Data Terpadu. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Malang pada tahun 2015. Bantuan program KUBE di tahun 2015 yang didapatkan Kabupaten Malang untuk 5 kecamatan yakni Bululawang, Wajak, Poncokusumo, Ngajum, dan Kromengan. Di tahun 2020 jumlah KUBE meningkat dan tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Gambar 1.2

Progress Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2018, 2019 dan 2020



Sumber: Kepala Seksi Pendamping dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tanggal 13 Oktober 2021

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pendamping dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Malang periode 1 Juli 2020 – 1 Juli 2021 pada tanggal 13 Oktober 2021 mengatakan bahwa:

“Tentunya tidak semua berhasil dalam menjalankan usahanya, ada beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak berkembang, dengan kata lain penerima bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak mendapat keuntungan, bahkan ditemukan pula usaha yang dijalankan gagal. Persentase tertinggi yaitu KUBE berkembang sejumlah 50%, KUBE maju 30% dan 20% KUBE yang gagal.”

Upaya pelaksanaan dan pengembangan program KUBE yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu pembinaan administrasi, dan dilakukannya monitoring dan evaluasi. Dari hasil wawancara peneliti tersebut dalam pengembangan dan pelaksanaan program KUBE ini permasalahan yang dihadapi berasal dari lingkungan internal KUBE yaitu meliputi kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral, SDM yang mendapat bantuan belum mendapatkan keterampilan, pemasaran produk yang masih konvensional, keterbatasan SDM pegawai pelaksana kegiatan, kurangnya motivasi dari anggota KUBE.

Hal tersebut tentunya mengakibatkan tidak optimalnya upaya pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang salah satunya yaitu proses monitoring dan evaluasi. Proses tersebut bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan KUBE yang terbentuk agar mengetahui apa saja yang perlu dilakukan perbaikan maupun inovasi pada KUBE tersebut. Sehingga KUBE tersebut bisa tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Hal ini

juga yang memicu beberapa KUBE berada di fase berkembang bahkan gagal dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pengembangan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Malang Menurut Permensos Nomor 2 Tahun 2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pengembangan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang oleh Dinas Sosial?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang oleh Dinas Sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pengembangan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang oleh Dinas Sosial
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang oleh Dinas Sosial

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam upaya pengembangan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik bagi pembaca maupun pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang baik sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan upaya pengembangan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Manfaat Akademis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke lapangan yang dapat menjadi bekal dalam pengembangan kemampuan berpikir dan menganalisa tentang upaya pengembangan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2. Bagi Institusi

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan upaya pengembangan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur dalam kepustakaan sehingga dapat membantu bagi terlaksananya

penelitian selanjutnya mengenai upaya pengembangan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).